

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN
DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA
MODAL**

(Studi Pada Pemerintah Daerah/Kota Jombang Tahun 2009-2018)

Eka Putri Wahyuningtyas*, Maslichah, Dwiyani Sudaryanti*****

ekap42241@gmail.com

Universitas Islam Malang

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of economic growth, regional original income, special allocation funds (DAK) affect the capital expenditure budget allocation. The population in this study is data on Economic Growth, Local Own Revenue (PAD), and Special Allocation Funds (DAK) as well as the Capital Expenditure Budget in the Regional / City Government of JOMBANG from 2009 to 2018. The sample used is the latest data starting from the year 2009 to 2018 with 10 years divided per quarter into 4 quarters per year. The sampling technique used is purposive sampling technique, the sample selected is 40 financial reports. The data were collected using the documentation method. The data analysis method used is multiple regression analysis with the help of SPSS software version 14 (Statistical Products and Service Solutions version 14). The results showed that the independent variable simultaneously had a significant effect on the dependent variable. Based on the coefficient of determination test results, the value of R2 Square is 48.3% while the remaining 51.7% is influenced by other variables not included in this study. Based on the results of the partial test, capital expenditure, economic growth, local revenue and special allocation funds have an positive effect on capital spending allocation.

Keywords: *Economic Growth, Local Own Revenue, Special Allocation Funds and Capital Expenditures*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah kewenangan, hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengelola, mengatur urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hukum dan peraturan saat ini. Hal itu sesuai dengan ketentuan umum yang ada dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.

Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa di setiap daerah mempunyai kewenangan mengurus dan mengatur urusan belanja-belanja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam alokasi sumber daya dan pemerintahan. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah yaitu menggunakan sumber-sumber keuangan yang di miliki daerah.

Tujuan dari otonomi daerah itu sendiri yaitu mempercepat pembangunan ekonomi dan pertumbuhan daerah, agar lebih efisien meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan respon pada karakteristik atau kebutuhan potensi di masing-masing daerah dan mengurangi ketidaksetujuannya dalam pembangunan yang telah berlangsung, menyebabkan ketidaksetaraan antara pemerintah daerah dan pusat.

Pertumbuhan ekonomi regional merupakan salah satu indikator keberhasilan pencapaian pembangunan daerah. Dengan pertumbuhan ekonomi, diasumsikan bahwa kebijakan pembangunan adalah salah satu yang paling penting di suatu daerah yang dirancang untuk membangun perekonomian daerah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan ekonomi. Peningkatan produktivitas dan infrastruktur yang tepat menarik investor untuk membuka bisnis mereka dengan fasilitas dan infrastruktur yang tepat, dan juga orang dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan aman dan nyaman. Pertambahan belanja modal yaitu suatu produktivitas masyarakat yang meningkat dan bertambahnya investor yang menyebabkan peningkatan pendapatan asli daerah pada periode berikutnya.

Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan daerah, pengelolaan kekayaan daerah, hasil pajak daerah dan PAD lainnya yang setara. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah diharap bisa meningkatkan nilai investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pada pelayanan publik menjadi semakin lebih baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan karena hal ini disebabkan oleh pendapatan asli daerah tersebut banyak yang tersedot untuk membiayai belanja lainnya. Potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi yaitu pendapatan Asli Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah.

Pengalihan dana yang diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan yaitu disebut Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004, dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang bertujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang sesuai dengan prioritas nasional dan merupakan urusan daerah yaitu merupakan Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus ditujukan pada kegiatan investasi pengadaan, pembangunan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik yang mempunyai umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Adanya pengalokasian DAK diharapkan bisa mempengaruhi belanja modal, karena DAK guna meningkatkan pelayanan publik cenderung menambah asset tetap yang dimiliki oleh pemerintah.

Pada peneliti terdahulu terdapat hasil yang berbeda-beda, yaitu Novalia (2016) menemukan bahwa Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal, artinya besarnya belanja modal selama ini terjadi tidak ditentukan oleh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Aryani (2017) menemukan bahwa Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja modal. Rumefi (2019) menemukan bahwa Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal” (Studi pada Pemerintah Daerah/Kota Jombang Tahun 2009-2018)**. Rumusan masalah penelitian ialah Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal ?

Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

Kontribusi penelitian yaitu :

1. Kontribusi Teoritis

- a. Bisa digunakan sebagai bahan referensi khususnya pengkajian topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini berhubungan dengan akuntansi sektor publik.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori keagenan pada bidang pemerintahan serta pada pengembangan materi akuntansi sektor publik.

2. Kontribusi Praktis

- a. Bagi Pemerintahan Daerah, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pentingnya mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan demi kemajuan daerah dengan menggunakan pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Khusus.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Menurut Mathius (2016: 5) teori keagenan adalah sebagai suatu versi dari *game theory* yang membuat suatu model kontraktual antara dua pihak atau lebih, dimana salah satu pihak disebut agen dan pihak yang lain disebut prinsipal. Agen diberi tanggungjawab atas membuat keputusan oleh prinsipal, hal itu juga dapat dikatakan bahwa agen diberi sebuah kepercayaan oleh prinsipal untuk melakukan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Terdapat perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal di dalam teori keagenan sehingga kemungkinan pihak agen tidak selalu melakukan tindakan terbaik untuk kepentingan prinsipal. Menurut Scott (2000) teori keagenan merupakan yang mempelajari suatu model kontraktual cabang dari *game theory* yang mendorong agen untuk bertindak bagi prinsipal saat kepentingan agen bisa saja bertentangan dengan kepentingan prinsipal. Agen diberi kewajiban atas pengambilan hasil akhir oleh prinsipal, di mana kekuasaan dan tanggungjawab tetap dalam kontrak ketenagakerjaan dengan persetujuan bersama. Dalam penelitian ini pemerintah sebagai agen dan rakyat sebagai prinsipal.

Anggaran Daerah

Anggaran dinyatakan dalam ukuran finansial apabila selama periode tertentu dapat mencapai estimasi kinerja, sedangkan metode atau proses untuk mempersiapkan anggaran disebut penganggaran. Hal ini mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan kapasitas anggaran daerah dan sumber daya daerah dan memainkan peranan penting dalam mereformasi pelayanan publik. Dewan Perwakilan Rakyat (Undang-Undang No. 17/2003) menyetujui rencana anggaran tahunan pemerintah negara yang disebut APBN (Mardiasmo, 2002).

Anggaran Belanja Modal

Menurut Situngkir (2009), Anggaran belanja modal adalah anggaran total pengeluaran sifatnya menambah aset tetap/inventaris dilakukan dalam rangka pendirian modal untuk memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Anggaran belanja modal akan memiliki konsekuensi dari mendapatkan aset tetap ketika belanja sepenuhnya berlaku. Itu berarti penambahan aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Namun, karena pengendalian yang berlaku dari pemerintah daerah Indonesia, yang mengatur pengelolaan anggaran keuangan dan daerah, setiap realisasi kebijakan yang berkaitan dengan biaya atau biaya (pengeluaran) harus ditolak oleh badan legislatif yang berisi kontrol lokal (PERDA).

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Siregar (2015: 36) pertumbuhan ekonomi merumuskan asumsi yang digunakan dalam pembuatan APBD, pemerintah daerah menggunakan data dan kondisi daerah. Dalam penyusunan asumsi utama dari APBD, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan menjelaskan atau mengukur pencapaian pembangunan ekonomi. Menurut Sukirno (2015:423) dalam kegiatan pertumbuhan ekonomi riil merupakan perkembangan fisik barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri, jumlah produksi barang industri, pengembangan infrastruktur, peningkatan jumlah sekolah, peningkatan produksi sektor jasa dan peningkatan produksi barang modal.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah yaitu sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan merupakan hak Pemerintah Daerah yang di akui sesuai pada Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Pasal 1. Menurut Siregar (2015:31) pendapatan asli daerah merupakan pengakuan yang diterima dari pemerintah daerah dari sumber wilayahnya yang dikumpulkan berdasarkan peraturan setempat. Pendapatan daerah setempat meliputi hasil perpajakan setempat, perpajakan daerah, pengelolaan kekayaan daerah khusus dan PAD lainnya yang setara.

Menurut Halim (2014:101-103), kelompok pendapatan daerah dibagi menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

- a) Pajak Daerah
- b) Retribusi Daerah
- c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah

d) Lain-lain PAD yang sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Transaksi ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas.

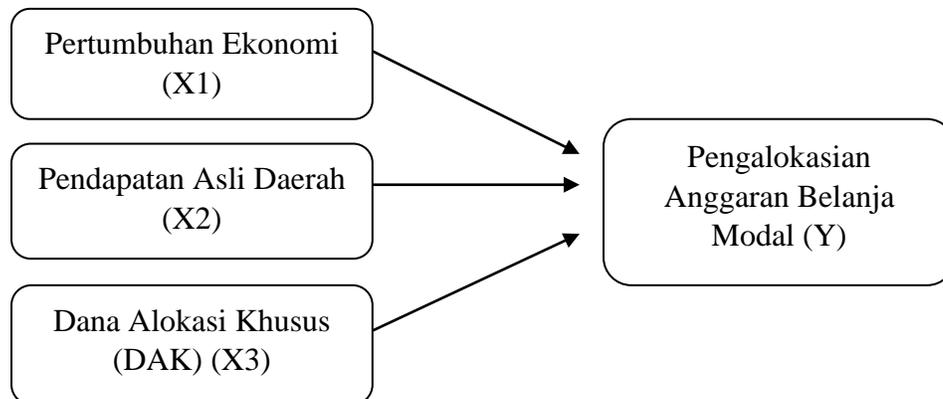
Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus yang akan membantu untuk membiayai kegiatan khusus sesuai dengan prioritas nasional dan urusan regional yang dialokasikan untuk daerah tertentu berdasarkan Undang Undang No.33 Tahun 2004. Pemanfaatan DAK mengarah pada kegiatan pengadaan, peningkatan, investasi pembangunan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik yang mempunyai umur ekonomis panjang, termasuk juga pengadaan sarana fisik penunjang. Guna meningkatkan pelayanan publik pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah.

Penelitian Terdahulu

Adiwiyana (2011) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki efek pada belanja modal. Ini berarti pemerintah daerah mampu memprediksi belanja modal yang didasarkan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Analisis selanjutnya menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh pada belanja modal.

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Hipotesis

H1 :Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

H1a :Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

H1b :Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

H1c :Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang memiliki hubungan sebab akibat antara dua atau lebih hubungan variabel. Populasi dalam penelitian ini pada data Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah/Kota JOMBANG dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2018. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Pada penelitian ini yang menjadi sampel yaitudata terbaru mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 dengan 10 tahun yang dibagi per triwulan menjadi 4 triwulan per tahun.

Metode Pengumpulan Data

Sumber data penelitian ini ialah data sekunder dengan metode dokumentasi, metode implementasi dokumentasi ini dengan mengumpulkan data seperti laporan keuangan.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yakni analisis regresi linear berganda, dan diolah dengan bantuan aplikasi SPSS 14.0.

Definisi Operasional Variabel

Pertumbuhan Ekonomi (X1)

Pertumbuhan ekonomi memiliki total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita, yang dihitung dengan rumus:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = (\text{PDBrt} - \text{PDBrt-1}) / (\text{PDBrt} - 1) \times 100\%$$

Keterangan Rumus :

PDBrt = Produk Domestik Bruto pada tahun tertentu (rt)

PDBrt-1 = Produk Domestik Bruto pada tahun sebelumnya (rt-1)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X2)

Menurut Halim (2002), Pendapatan Asli Daerah yaitu semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi riil daerah, Ini mencakup pendapatan dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah, dan lain-lain Pendapatan yang sah berdasarkan (UU No. 22 th 2009). Yang dirumuskan dengan :

$$\text{PAD} = \text{HPD} + \text{RD} + \text{PLPD} + \text{LPS}$$

Keterangan :

- PAD : Pendapatan Asli Daerah
- HPD : Hasil Pajak Daerah
- RD : Retribusi Daerah
- PLPD : Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah
- LPS : Lain-lain Pendapatan Daerah yang SAH

Dana Alokasi Khusus (DAK) (X3)

Dana alokasi khusus di setiap kabupaten/kota dalam laporan APBD dapat ditemukan dari pos dana perimbangan.

Belanja Modal (Y)

Belanja modal untuk aset tetap (aset yang diperoleh) yang menguntungkan selama lebih dari satu periode perhitungan. Indikator variabel ini diukur dengan :

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan} + \text{Belanja Aset Lainnya}$$

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Analisis Data

Populasi penelitian ini berjumlah 40 sampel yang berasal dari 10 tahun yang dibagi per triwulan menjadi 4 triwulan per tahun.

Hasil Statistik Deskriptif

Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PE	40	-,72	1,48	,5173	,54428
PAD	40	10,27	11,33	10,7451	,27298
DAK	40	10,11	11,19	10,4870	,31113
BM	40	8,86	11,43	10,3355	,76204
Valid N (listwise)	40				

Sumber: Output SPSS, 2020

Kesimpulan dari hasil statistik deskriptif yaitu :

1. Pertumbuhan Ekonomi (X_1) mempunyai nilai *minimum* sebesar -0,72; nilai *maksimum* sebesar 1,48; *mean* sebesar 0,5173; dengan *standar deviasi* sebesar 0,54428.
2. Pendapatan Asli Daerah (X_2) mempunyai nilai *minimum* sebesar 10,27 hasil dari log sebesar 18.417.780.608,26; nilai *maksimum* sebesar 11,33 hasil dari log 213.931.516.763,44 sebesar; *mean* sebesar 10,74510; dengan *standar deviasi* sebesar 0,27298.
3. Dana Alokasi Khusus (X_3) mempunyai nilai *minimum* sebesar 10,11 hasil dari log sebesar 12.920.820.000,00; nilai *maksimum* sebesar 11,19 hasil dari log sebesar 153.483.349.500,00; *mean* sebesar 1,4870; dengan *standar deviasi* sebesar 0,31113.
4. Belanja Modal (Y) mempunyai nilai *minimum* sebesar 8,86 hasil dari log sebesar 720.517525,00; nilai *maksimum* sebesar 11,43 hasil dari log sebesar 270.248.438.932,00; *mean* sebesar 10,3355; dengan *standar deviasi* sebesar 0,76204.

Hasil Uji Normalitas

Hasil uji normalitas *One Sample – Kolmogorov Smirnov* menunjukkan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal. Besarnya nilai *Kolmogorov – Smirnov* pada variabel Pertumbuhan Ekonomi yaitu 0,559 atau *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,914, variabel Pendapatan Asli Daerah yaitu 0,845 atau *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,472, variabel Dana Alokasi Khusus yaitu 0,970 atau *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,304, dan variabel Belanja Modal yaitu 0,700 atau *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,711 > tingkat signifikansi (α) 0,05.

Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai VIF dan nilai *tolerance* yaitu pada variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1,036 dan 0,966, variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,095 dan 0,913, dan variabel Dana Alokasi Khusus sebesar 1,063 dan 0,941. Maka, disimpulkan tiap-tiap variabel independen memiliki nilai VIF < 10 serta *tolerance* > 0,1 artinya antar variabel independen tidak adanya masalah multikolinearitas.

b. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Khusus lebih besar dari 0,05. Maka, disimpulkan seluruh nilai signifikansinya > 0,05 berarti masing-masing variabel terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

c. Hasil Uji Autokorelasi

Hasil uji korelasi nilai Durbin-Wantson lebih besar dari 1,796 atau -2 dan lebih besar dari +2 (-2 > 1,796 < +2) dan angka Durbin-Wanston ini merupakan terbebas dari masalah autokorelasi.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 2 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2,379	1,121		-2,122	,041
	PE	,012	,003	,521	4,276	,000
	PAD	,230	,106	,272	2,172	,037
	DAK	,095	,047	,251	2,035	,049

Sumber: Output SPSS, 2020

$$BM = -2,379 + 0,012x_1 + 0,230x_2 + 0,095x_3 + e$$

Hasil Uji Hipotesis

a. Uji Simultan

Tabel 3 Hasil Uji Simultan

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6,745	3	2,248	5,090	,005(a)
	Residual	15,902	36	,442		
	Total	22,648	39			

Sumber: Output SPSS, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa diperoleh nilai F_{hitung} (5,090) memiliki nilai signifikansi F sebesar 0,005 lebih kecil dari α (0,05), sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya bahwa secara simultan, variabel independen yaitu X_1 (Pertumbuhan Ekonomi), X_2 (Pendapatan Asli Daerah), X_3 (Dana Alokasi Khusus) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y (Belanja Modal).

b. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,695(a)	,483	,440	,17225

Sumber: Output SPSS, 2020

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan besarnya R^2 Square adalah 0,483 atau 48,3% variasi Belanja Modal dapat dijelaskan dengan variasi dari ketiga variabel independen yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan 51,7% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

c. Uji Parsial

Berdasarkan tabel 2 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal

Variabel X_1 (Pertumbuhan Ekonomi) memiliki statistik uji t sebesar 4,276 dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari α (0,05). Pengujian ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_{1a} diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X_1 (Pertumbuhan Ekonomi) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Belanja Modal. Pada dasarnya Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita diproduksi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita (Boediono, 1985). Pertumbuhan Ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya Pertumbuhan Ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan. Pertumbuhan Ekonomi merupakan angka yang menunjukkan kenaikan kegiatan perekonomian suatu daerah setiap tahunnya. Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan penambahan penduduk. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah daerah diharapkan akan memacu Pertumbuhan Ekonomi daerah. Biasanya bila Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah baik, maka pemerintah daerah setempat akan terus meningkatkan alokasi Belanja Modalnya dari tahun ke tahun guna melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada tahun anggaran. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yovita (2011).

2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Variabel X_2 (Pendapatan Asli Daerah) memiliki statistik uji t sebesar 2,172 dengan signifikansi sebesar 0,037 lebih kecil dari α (0,05). Pengujian ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan $H1_b$ diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X_2 (Pendapatan Asli Daerah) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Belanja Modal. Bratakusumah & Sholikin (2003) mengartikan Pendapatan Asli Daerah sebagai pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan guna membiayai kegiatan-kegiatan daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah. Menurut UU Nomor 22 tahun 1999 pasal 79 disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba badan usaha milik daerah, dan penerimaan lain-lain. Pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah yang baik serta diikuti dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah maka akan meningkatkan Belanja Modal dalam Daerah tersebut. Sesuai dengan hasil penelitian di atas, maka semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dan pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah yang benar maka akan semakin besar dana yang disalurkan pemerintah daerah untuk melakukan Belanja Modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardhani (2011).

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Variabel X_3 (Dana Alokasi Khusus) memiliki statistik uji t sebesar 2,035 dengan signifikansi sebesar 0,049 lebih kecil dari α (0,05). Pengujian ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan $H1_c$ diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X_3 (Dana Alokasi Khusus) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Dengan adanya pengalokasian Dana Alokasi Khusus diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran Belanja Modal karena Dana Alokasi Khusus cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik. Berdasarkan hasil penelitian di atas yaitu semakin besar Dana Alokasi Khusus maka dapat menyebabkan semakin besar pula kegiatan Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Surakhman dkk (2019).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Keterbatasan

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa keterbatasan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini hanya menggunakan Kabupaten Jombang saja. Sehingga kesimpulan penelitian ini mungkin tidak akan berlaku untuk kabupaten yang lainnya;
2. Variabel-variabel yang bisa digunakan untuk mengetahui pengaruh terhadap Belanja Modal ada banyak, namun dalam penelitian ini hanya menggunakan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus variabel independen. Sehingga untuk penelitian selanjutnya perlu adanya penambahan variabel-variabel independen yang lain agar mampu menjelaskan jumlah informasi sosial yang diungkapkan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis data yang dilakukan maka diajukan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel penelitian dan tidak terbatas hanya pada kabupaten Jombang saja, seperti menambah seluruh kabupaten di provinsi Jawa Timur sehingga diharapkan dapat meningkatkan keakuratan hasil penelitian;
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain sebagai variabel independen yang terkait hubungannya dengan Belanja Modal, misalnya Dana Alokasi Umum, Pengeluaran Daerah dan Pembiayaan Surplus Anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Surakhman, Abid Djazuli, dan Choiriyah. 2019. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Palembang. *Jurnal Manajemen Bisnis dan Akuntansi*. 7(2).
- Adiwiyana, Priya. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ardhani, Pungky. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). Skripsi, Universitas Diponegoro.
- Bratakusumah & Sholikin. 2003. Otonomi Penyelenggara Pemerintah Daerah. Gramedia Pustaka. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2002. Seri Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2014. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Mathius Tandiontong. 2016. Kualitas Audit dan Pengukurannya. Bandung. Penerbit Alfabeta.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Novalia, Dwi, Nanda. 2016. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Lampung.
- Rumefi, Ufi. 2019. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Magister Manajemen*. Vol 2(2).
- Scott, William R. 2000. *Financial Accounting Theory*. USA: Prentice-Hall.
- Situngkir, Anggiat. 2009. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemko/Pemkab Sumatera Utara. Tesis. Universitas Sumatera Utara. Medan. Online 26 November 2013. repository.usu.ac.id.

Siregar, Baldric. 2015. Akuntansi Sektor Publik. Cetakan Pertama. Edisi Pertama. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Sukirno, Sadono. 2015. Makro Ekonomi Teori Pengantar. Edisi 1. Cetakan 21. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Yovita, M, Farah. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008 – 2010). Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro.

*) Eka Putri Wahyuningtyas adalah Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.

**) Maslichah adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.

***) Dwiyani Sudaryanti adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.